PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, INFLASI, DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS PENCURIAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

RETNISA PUSPITASARI

NIM. B1011221049

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Retnisa Puspitasari
NIM	:	B1011221049
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Pencurian Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat padapembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.
Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 20 Juli 2026

Retnisa Puspitasari
NIM. B1011221049

PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Retnisa Puspitasari
NIM	:	B1011221049
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Pencurian Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip mauoun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 20 Juli 2026

Retnisa Puspitasari
NIM. B1011221049

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh ketimpangan Pendapatan, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kriminalitas Pencurian Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Retnisa Puspitasari
B1011221049

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	29 Juli 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Restiatun, S.E., M.Si. NIP 197505212002122001	3/9-2026	
2.	Ketua Penguji	Prof. Dr. Hj. Fariastuti, S.E., M.A. NIP 196303171986032002	2/9/2026	
3.	Anggota Penguji	Farah J. Meutianingrum, SE, MEc.Dev NIP 199406242024062003	1/9/2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 15 SEP 2026
Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini, Pembimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa :

Nama	: Retnisa Puspitasari
NIM	: B1011221049
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	: Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Pencurian Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.

	Nama/ NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Tugas Akhir	Dr. Restiatun, S.E., M.Si. NIP. 19750521 200212 2001	20/7/2026	

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaan yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, INFLASI DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT". Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjungpura Pontianak dan merupakan wujud dari ilmu-ilmu yang diperoleh selama ini. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Juanda Astarani, S.E., M.sc., CSRS., CfrA., CAPM., CAPF. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E, M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Dr. Restiatun, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing, serta memberi masukan, motivasi dan arahan kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat berjalan dengan lancar.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Fariastuti, S.E., M.A selaku Penguji Pertama yang telah memberi masukan dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Ibu Farah J. Meutianingrum, SE, MEc.Dev selaku Penguji Kedua yang telah memberi masukan dalam penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pembelajaran selama masa studi di kampus.
8. Bapak dan Ibu Staf Akademik, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan dan seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu penulis selama masa studi.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, meskipun kita jarang menyampaikan apa yang dirasa melalui kata-kata, penulis tahu bahwa di balik keheningan itu tersimpan doa yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa dukungan yang kalian berikan selama ini hadir dalam bentuk yang berbeda. Kalian mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Setiap langkah dan pencapaian yang penulis raih, termasuk terselesaikannya skripsi ini, adalah bagian dari doa dan harapan kalian. Terima kasih atas segala kerja keras, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah kalian berikan.
10. Kepada saudara kandung penulis, Bang Lukman, Kak Nopa, Kak Mita, dan Riski. Terima kasih penulis ucapkan atas segala dukungan, doa, perhatian, dan nasihat yang telah diberikan hingga penulis dapat mencapai titik ini.
11. Penulis juga mengucapkan terimakasih keponakan tersayang, Kimora. kehadirannya dengan tawa dan keceriaan sering kali menjadi penghibur ditengah proses

penyusunan skiripsi ini. Semoga tumbuh menjadi pribadi yang baik, serta selalu dikelilingi oleh kebahagiaan dalam setiap langkah kehidupan.

12. Kepada teman seperjuangan sejak awal perkuliahan, yaitu Lia dan Rani yang telah memberikan dukungan, semangat, serta menemani saya selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini agar saya tidak cepat menyerah dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
13. Kepada teman penulis semasa SMA yaitu, Nola, Julia, Leyla, Epa, dan Mauli yang selalu memberi dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
14. Teman terdekat penulis Tiara, Tita dan Pija. Terimakasih selalu memberi dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
15. Kepada semua teman-teman kuliah penulis terutama teman kelas Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan A, yang telah memberikan kenangan indah sepanjang masa perkuliahan. Terimakasih atas dukungan dari awal hingga akhir perkuliahan.
16. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Dimas. yang telah sabar dan rela membantu serta mau direpotkan saat awal penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala perhatian, dukungan, dan semangat yang telah diberikan. Tanpa bantuan dimas perjalanan skripsi ini tidak akan mudah.
17. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Retnisa puspitasari. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai referensi akademik maupun sebagai dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang, dengan harapan agar karya ini dapat menjadi tulisan yang lebih baik ke depannya.

Pontianak, 14 September 2026

Penulis,
Retnisa Puspitasari
B1011221049

PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, INFLASI, DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS PENCURIAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh: Retnisa Puspitasari

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, serta stabilitas kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kriminalitas yang paling sering terjadi di Provinsi Kalimantan Barat adalah tindak pidana pencurian. Tingginya angka kriminalitas pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga berdampak pada menurunnya rasa aman, menghambat aktivitas ekonomi, serta mempengaruhi proses pembangunan daerah. Fenomena kriminalitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum dan sosial, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi ekonomi masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang tercermin melalui Gini Ratio menunjukkan adanya perbedaan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Selain itu, inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus berpotensi menurunkan daya beli masyarakat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Sementara itu, tingginya tingkat pengangguran mencerminkan masih adanya angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan sehingga dapat menimbulkan tekanan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi pada ketiga indikator ekonomi tersebut selama periode penelitian. Gini Ratio mengalami perubahan dari tahun ke tahun yang menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat belum sepenuhnya merata. Tingkat inflasi juga mengalami fluktuasi, terutama setelah terjadinya lonjakan inflasi pada tahun 2022, sedangkan tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun setelah pandemi Covid-19. Di sisi lain, jumlah kasus kriminalitas pencurian pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat masih mengalami perubahan setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi diduga memiliki keterkaitan terhadap tingkat kriminalitas pencurian. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran terhadap kriminalitas masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas pencurian pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Permasalahan

Penelitian ini menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas pencurian pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Ketimpangan pendapatan digunakan untuk melihat sejauh mana kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kriminalitas pencurian. Inflasi dianalisis karena kenaikan harga barang dan jasa dapat mempengaruhi daya beli masyarakat serta kondisi ekonomi rumah tangga. Pengangguran juga menjadi variabel yang dianalisis karena terbatasnya kesempatan kerja dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat. Selain itu, masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kriminalitas,

di mana beberapa penelitian menemukan pengaruh yang signifikan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Penelitian mengenai kriminalitas pencurian menggunakan data panel pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat juga masih relatif terbatas sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kriminalitas pencurian.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas pencurian pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, baik secara parsial maupun secara simultan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui hubungan masing-masing variabel ekonomi terhadap tingkat kriminalitas pencurian sehingga dapat memberikan bukti empiris yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah untuk mengurangi angka kriminalitas melalui perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

4. Metode Penelitiaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan kausalitas. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel yang terdiri atas 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2019–2024 sehingga menghasilkan 84 observasi. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dan publikasi resmi lainnya yang berkaitan dengan variabel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Berdasarkan hasil pengujian, *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih sebagai model terbaik dalam mengestimasi pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas pencurian. Selanjutnya dilakukan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi (Adjusted R^2) untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antarvariabel.

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas pencurian. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan maka kecenderungan terjadinya kriminalitas pencurian juga semakin meningkat. Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas pencurian, sehingga perubahan tingkat inflasi belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap perubahan tingkat kriminalitas pencurian selama periode penelitian. Pengangguran berpengaruh negatif dan terhadap tingkat kriminalitas pencurian. Secara simultan, ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas pencurian pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdsarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas pencurian pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas pencurian. Pengangguran menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kriminalitas pencurian. Secara bersama-sama, ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas pencurian. Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk terus mengupayakan pemerataan pendapatan melalui peningkatan kesempatan ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga guna mempertahankan daya beli masyarakat, serta memperluas kesempatan kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan tingkat kriminalitas pencurian di Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNG JAWABAN TUGAS AKHIR ii
UCAPAN TERIMAKASIH v
RINGKASAN vii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR TABEL.....x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN..... xii
ABSTRAK.....1
1. PENDAHULUAN 2
2. TELAAH PUSTAKA 5
2.1 Landasan Teori 5
2.2 Tinjauan Empiris.....6
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian.....7
3. METODE PENELITIAN.....8
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 12
4.1 Hasil Penelitian.....12
4.2 Pembahasan 15
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....17
5.1 Kesimpulan.....17
5.2 Saran 17
RUJUKAN PUSTAKA.....17
LAMPIRAN.....21

DAFTAR TABEL

Table 1. Hasil Uji Pemilihan Model 12
Table 2. Hasil Uji Multikolinearitas..... 13
Table 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 13
Table 4. Hasil Uji Autokorelasi 13
Table 5. Hasil Estimasi Model Data Panel..... 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 2
Gambar 2. Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahub 2019-2023 (Indeks) 3
Gambar 3. Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 (Persen) 4
Gambar 4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Persen) 5
Gambar 5 . Hasil Uji Normalitas 12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data panel Ketimpangan Pendapatan (X1), Inflasi (X2), Pengangguran (X3), dan Tingkat Kriminalitas (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 21

PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, INFLASI DAN PENGANGGURAN TERHADAP KRIMINALITAS PENCURIAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

[1]Retnisa Puspitasari

Universitas TanjungPura, Indonesia

ABSTRACT

Theft crime remains one of the most prevalent criminal offenses in West Kalimantan Province and is suspected to be influenced by various economic factors, including income inequality, inflation, and unemployment. This study aims to analyze the effects of income inequality, inflation, and unemployment on the level of theft crime across regencies and municipalities in West Kalimantan Province. This research employed a quantitative approach using descriptive and causal research methods. The study utilized secondary panel data covering 14 regencies and municipalities in West Kalimantan Province during the 2019–2023 period. The data were analyzed using panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM), which was selected as the most appropriate model based on the Chow Test and Hausman Test results. The findings indicate that income inequality has a positive and significant effect on theft crime, while unemployment has a negative and significant effect on theft crime. Meanwhile, inflation has a negative but statistically insignificant effect on theft crime. Simultaneously, income inequality, inflation, and unemployment have a significant effect on theft crime. The Adjusted R-squared value of 0.7495 indicates that 74.95% of the variation in theft crime can be explained by the three independent variables, while the remaining 25.05% is explained by other factors outside the research model.

Keywords: *Income Inequality, Inflation, Unemployment*, *Crime*

ABSTRAK

Kriminalitas pencurian masih menjadi salah satu jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dan diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas pencurian pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan kausalitas. Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2019–2023. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) sebagai model terbaik berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas pencurian, pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas pencurian, sedangkan inflasi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kriminalitas pencurian. Secara simultan, ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas pencurian. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,7495 menunjukkan bahwa 74,95% variasi tingkat kriminalitas pencurian dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 25,05% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

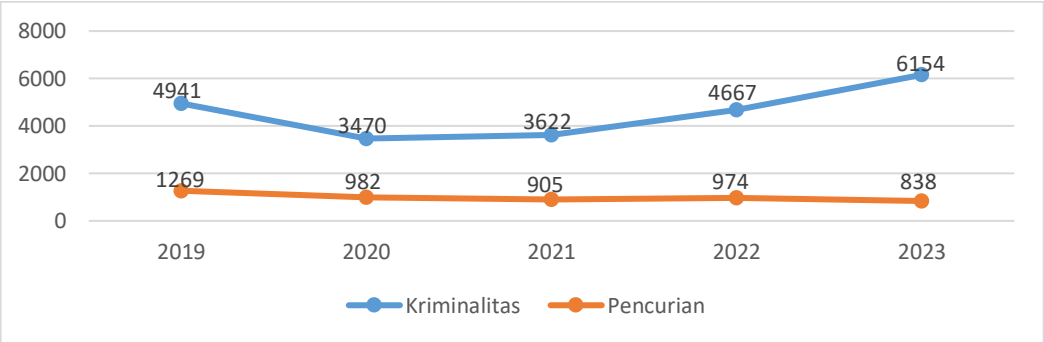
Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Inflasi, pengangguran, Kriminalitas

[1]b1011221049@student.untan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda. Tindakan kriminal tidak hanya melanggar aturan hukum saja, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat. Keamanan dan ketertiban merupakan kondisi yang penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Tingginya tingkat kejahatan dapat mengancam rasa aman dan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat (Stiawan & Yusuf, 2025).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Polda Kalimantan Barat, kasus pencurian merupakan kasus tindak pidana yang paling banyak dilaporkan di Provinsi Kalimantan Barat (Antara News, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan pencurian jenis tindak kriminal yang paling banyak terjadi dan memerlukan perhatian khusus. Berikut gambar yang menunjukkan Tingkat Kriminalitas Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023.



Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Gambar 1 perkembangan kasus kriminalitas pencurian di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2019–2023 mengalami flukuasi, Jumlah kasus kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 6.154 kasus, sedangkan total kasus pencurian terhadap total kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 28,30%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang dominan di Provinsi Kalimantan Barat.

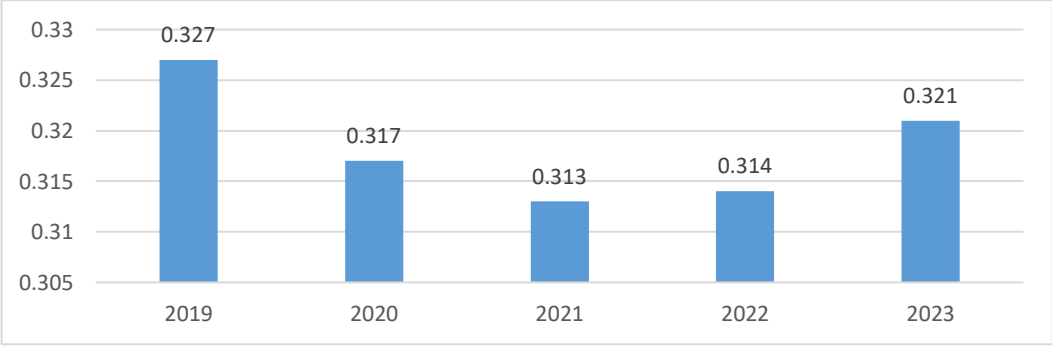
Tingginya angka pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga berpotensi mengurangi rasa aman masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, serta menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial (Palokoto dkk., 2020). Peningkatan kasus tersebut mencerminkan bahwa kriminalitas pencurian masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya mengkaji berbagai faktor ekonomi yang diduga memengaruhi terjadinya tindak kriminalitas pencurian sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih efektif.

Kejahatan pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang menimbulkan kerugian materiil dan mengurangi rasa aman

masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi keamanan suatu wilayah (Winda & Sentosa, 2022). Kejahatan pencurian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi perekonomian masyarakat. Salah satu faktor ekonomi yang diduga memengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian yaitu ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan menunjukkan adanya perbedaan distribusi pendapatan antarmasyarakat sehingga menyebabkan sebagian masyarakat memperoleh pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya.

Ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan tekanan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Ketika pendapatan yang diterima tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat, sebagian individu dapat terdorong melakukan berbagai cara untuk memperoleh tambahan pendapatan, termasuk melalui tindakan kriminal seperti pencurian (Dharmawan dkk, 2025). Hubungan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor ekonomi yang diduga berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencurian, terutama ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pernyataan ini di dukung oleh penelitian Salimah & Wahyudi (2025) yang menunjukkan bahwa ketimpangan berpengaruh terhadap Tingkat kriminalitas pencurian.

Ketimpangan pendapatan dapat menciptakan kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah sehingga memunculkan rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Ketika kesenjangan ekonomi semakin melebar, masyarakat berpendapatan rendah cenderung merasa tidak memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh sumber daya dan peluang ekonomi (Susanti dkk., 2025). Kondisi ini berpotensi mendorong sebagian individu mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk melalui tindakan menyimpang seperti melakukan tindakan pencurian. Berikut gambar yang menunjukan Ketimpangan Pendapatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023.

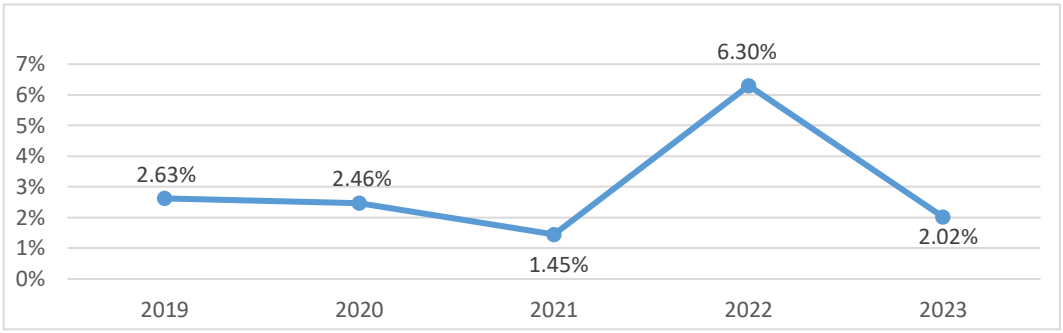


Gambar 2. Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Barat tahub 2019-2023 (Indeks)
Sumber:Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 2 menunjukkan bahwa Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019–2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, Gini Ratio mencapai nilai sebesar 0,327, kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya, sebelum kembali meningkat menjadi 0,321 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat masih belum merata. Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya ketimpangan pendapatan yang dapat meningkatkan

tekanan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Keterbatasan kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup berpotensi meningkatkan kecenderungan terjadinya tindak pidana pencurian.

Selain ketimpangan pendapatan, faktor ekonomi lain yang diduga memengaruhi tingkat kriminalitas pencurian adalah inflasi. Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Penurunan daya beli tersebut mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila pendapatan yang diterima tidak mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga, tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat akan semakin besar. Kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian individu melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk tindak pidana . Berikut gambar yang menunjukan Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023.



Gambar 3. Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023 (Persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) (2025)

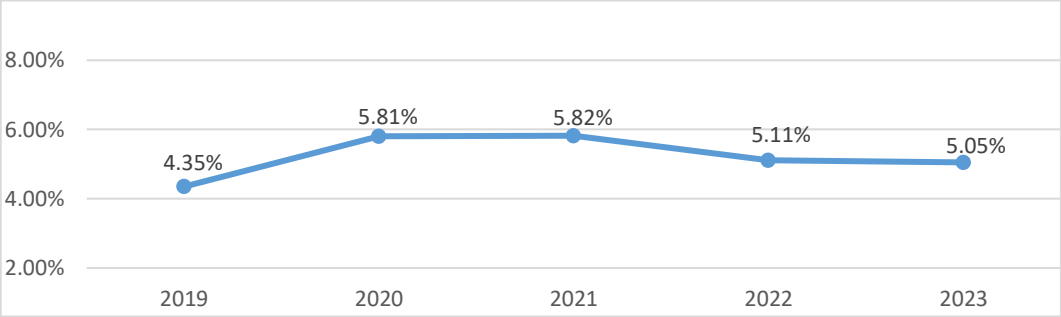
Gambar 3 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi selama periode 2019–2023. Tingkat inflasi meningkat hingga mencapai 6,30% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 2,02% pada tahun 2023. Penurunan tersebut menunjukkan kondisi perekonomian yang relatif lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, inflasi tetap menjadi indikator penting karena memengaruhi daya beli masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana pencurian.

Kondisi perekonomian yang tidak stabil tidak hanya berpengaruh pada peningkatan tingkat inflasi, namun juga berpengaruh terhadap kondisi pasar tenaga kerja. Tekanan ekonomi yang terjadi dapat mendorong berkurangnya kesempatan kerja, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran. Individu yang tidak memiliki pekerjaan cenderung menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat.

Kurangnya lapangan pekerjaan menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran sehingga sebagian masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap. Kondisi tersebut mengakibatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadi terbatas, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber penghasilan lain. Tekanan ekonomi yang semakin besar dapat memengaruhi perilaku individu dalam mencari cara untuk memperoleh pendapatan. Dalam kondisi

tertentu, keterbatasan kesempatan kerja dan sulitnya memperoleh penghasilan dapat meningkatkan kecenderungan sebagian individu melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk tindak pidana pencurian (Zahra & Usman, 2023).

Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja, tetapi juga menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mampu memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut diduga dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana pencurian, terutama apabila tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan peluang memperoleh pendapatan yang memadai.Berikut disajikan gambar yang menunjukkan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat pada periode tahun 2019-2023.



Gambar 4. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat mengalami fluktuasi selama periode 2019–2023. Tingkat pengangguran meningkat hingga mencapai 5,82% pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan menjadi 5,05% pada tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, tingkat pengangguran masih menunjukkan bahwa sebagian angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan sehingga berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana pencurian.

Berdasarkan uraian mengenai perkembangan kriminalitas pencurian, ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat, ketiga indikator ekonomi tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan tingkat kriminalitas pencurian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas pencurian pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pencegahan kriminalitas melalui perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori *Rational Choice* yang dikembangkan Becker (1968), menjelaskan bahwa tindakan kejahatan pencurian merupakan hasil dari keputusan rasional individu berdasarkan pertimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya atau risiko yang

harus ditanggung. Individu diasumsikan mampu membandingkan keuntungan dari melakukan tindakan kriminal dengan keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas yang legal. Dalam konteks pencurian, keputusan tersebut umumnya dipengaruhi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama ketika kondisi ekonomi dan keterbatasan kesempatan kerja menyebabkan pendapatan dari aktivitas legal dianggap tidak mencukupi (Kusumawati & Aisyah, 2024).

Menurut teori ini, sebelum menentukan keputusan melakukan pencurian, individu akan membandingkan manfaat yang diharapkan dengan biaya yang mungkin timbul, seperti risiko penangkapan, sanksi hukum, dan hukuman yang diterima. Perhitungan benefit-cost tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah tindakan kriminal dianggap lebih menguntungkan dibandingkan aktivitas yang sah (Uduo, 2024). Apabila manfaat yang diharapkan lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung, kecenderungan individu untuk melakukan pencurian akan meningkat. Sebaliknya, jika biaya yang dihadapi lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, individu cenderung mengurungkan niat melakukan tindak pidana (Agustian & Wiyono, 2021).

Teori Rational Choice juga menjelaskan bahwa kondisi ekonomi dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan individu dalam melakukan tindak pidana. Ketika kesempatan memperoleh pendapatan melalui aktivitas yang sah semakin terbatas, sementara keuntungan yang diharapkan dari tindakan kriminal dinilai lebih besar daripada risiko yang dihadapi, individu cenderung memilih melakukan pencurian (Becker, 1968).

Strain Theory yang dikemukakan oleh Merton (1938) menjelaskan bahwa tindakan kriminal dapat muncul akibat adanya ketegangan (*strain)* atau kesenjangan antara tujuan sosial yang ingin dicapai dengan kesempatan yang dimiliki individu untuk mencapainya melalui cara-cara yang sah. Merton menyebut kondisi tersebut sebagai *anomie*, yaitu keadaan ketika norma sosial tidak lagi mampu mengarahkan perilaku individu karena terbatasnya akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan dan frustrasi sehingga mendorong individu mencari alternatif lain untuk mencapai tujuan, termasuk melalui tindakan kriminal.

Dalam perspektif *Strain Theory*, tekanan ekonomi merupakan salah satu bentuk ketegangan yang dapat mendorong individu melakukan tindak pidana. Ketika individu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat terbatasnya kesempatan memperoleh pendapatan melalui cara yang sah, kecenderungan untuk melakukan pencurian dapat meningkat sebagai salah satu alternatif dalam mencapai tujuan ekonomi. Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa kondisi ekonomi yang tidak mendukung dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencurian (Merton, 2017).

2.2 Tinjauan Empiris

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas. Namun, hasil penelitian tersebut menunjukkan temuan yang belum konsisten sehingga masih terdapat perbedaan mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas. Misalnya, hasil penelitian Septaria & Zulfaridatulyaqin, (2021) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kejahatan di Kota Banjarmasin periode 2007–2018. Hasil

tersebut didukung oleh penelitian (Zahra & Usman, 2023), Amilia & Ridwan, (2024), Yusuf & Zanudin, (2025), serta Susanti dkk., (2025) yang menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin tinggi pula kecenderungan terjadinya tindak kriminalitas. Namun, hasil penelitian Andressony, (2024) dan Soraya dkk., (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas.

Penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap kriminalitas masih menunjukkan hasil yang beragam. Sihaloho dkk., (2024) menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Sumatera Utara periode 2016–2021. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat inflasi tidak selalu diikuti oleh perubahan tingkat kriminalitas karena masih terdapat faktor ekonomi dan sosial lainnya yang turut memengaruhi.

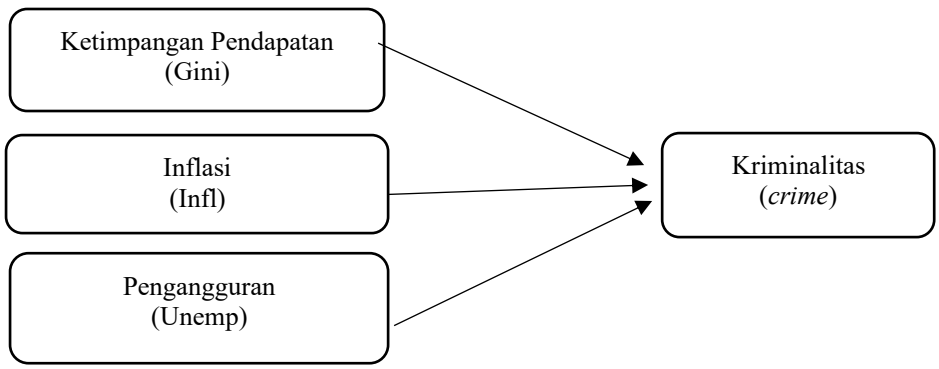
Sementara itu, penelitian mengenai pengaruh pengangguran terhadap kriminalitas juga menunjukkan hasil yang berbeda. Salimah & Wahyudi, (2025), Yusuf & Zanudin, (2025), Amilia & Ridwan, (2024) serta Dharmawan dkk (2025) menemukan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kriminalitas. Sebaliknya, Febbyanto dkk., (2026), Soraya dkk., (2024) serta Audey & Ariusn, (2019) menunjukkan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan temuan mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran terhadap kriminalitas. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas pencurian di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat periode 2019-2023 perlu dilakukan untuk memberikan bukti empiris pada wilayah dan periode penelitian yang berbeda.

2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran terhadap tingkat kriminalitas pencurian di Provinsi Kalimantan Barat, maka disusunlah kerangka konseptual dengan pengaruh yang dinyatakan sesuai pada arah anak panah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Gambar diatas menunjukkan bahwa kejahatan terkait pencurian dapat terjadi dan terus meningkat di bawah pengaruh berbagai faktor ekonomi yaitu ketimpangan pendaptan, inflasi, dan pengangguran.

2.3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini belum dibuktikan secara empiris, karena didasarkan pada teori yang telah disesuaikan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual, berikut merupakan hipotesis atau hasil sementara yang menjadi dasar pemikiran dari penelitian:

1. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas pencurian di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas pencurian di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas pencurian di Provinsi Kalimantan Barat.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitiaan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kausalitas. Objek pada penelitiaan ini adalah 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan berbentuk data panel (*pooled data*), yaitu gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data *time series* yang digunakan mencakup periode tahun 2019 sampai dengan 2023, sedangkan data *cross section* terdiri atas 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data penelitian bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ketimpangan pendapatan, inflasi, pengangguran, dan jumlah kriminalitas pencurian.

3.3 Variabel Penelitiaan dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kriminalitas pencurian, sedangkan variabel independennya yaitu ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran. Definisi operasional serta pengukuran masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut. **(**Badan Pusat Statistik, 2025)

1. Kriminalitas (Crime)

Tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun komunitas yang melanggar hukum dan dapat mengganggu ketenteraman serta ketertiban masyarakat. Dalam penelitian ini, kriminalitas yang dimaksud adalah tindak pidana pencurian yang tercatat atau dilaporkan kepada pihak kepolisian di Kabupaten/Kota

Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian, data kriminalitas pencurian yang digunakan dalam penelitian merupakan kasus pencurian yang tercatat dalam data kepolisian selama periode penelitian. Diukur dalam bentuk kasus.

2. Ketimpangan Pendapatan (Gini)

Ketidakseimbangan atau jurang pemisah yang mencolok dalam distribusi pendapatan, kekayaan, atau peluang di dalam suatu masyarakat. Diukur menggunakan Gini Ratio, dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Diukur dalam indeks.

3. Inflasi (Infl)

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha, atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diukur dalam persentase.

3.4 Metode dan Alat Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan alat analisis yaitu Eviews 14. Adapun model estimasi yang digunakan dalam persamaan pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi dan pengangguran terhadap Tingkat kriminalitas pencurian sebagai berikut :

$$\boldsymbol{Log\ Crime_{it} = \alpha + \beta_1 Gini_{it} + \beta_2 Infl_{it} + \beta_3 Unemp_{it} + e_{it}}$$

Keterangan :

$Crime_{it}$	= Krimnalitas Pencurian
Log	= Logaritma
α	= Konstanta
$\beta_1\ \beta_2\ \beta_3$	= Koefiesien regresi variabel bebas 1 sampai 3
$Gini_{it}$	= Ketimpangan Pendapatan
nfl_{it}	= Inflasi
$Unemp_{it}$	= Pengangguran
E	= Error
I	= Wilayah
t	= Periode tahun 2019-2023

Untuk menganalisis data panel, terdapat tiga model yang digunakan yaitu sebagai berikut (Ghozali 2021).

1. Common Effect Model (CEM): Model ini mengasumsikan bahwa seluruh unit observasi memiliki karakteristik yang seragam, baik antar individu maupun antar periode waktu. Kelemahan model ini adalah kurang mampu menggambarkan kondisi sebenarnya apabila terdapat heterogenitas yang signifikan antar unit observasi.

2. *Fixed Effect Mode* (FEM): Model ini mengasumsikan bahwa setiap unit observasi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, dan perbedaan tersebut bersifat tetap selama periode penelitian. Kelemahan model ini adalah

proses estimasinya lebih rumit dan tidak dapat digunakan untuk mengukur variabel yang tidak mengalami perubahan sepanjang waktu.

3. Random Effect Model (REM): Model ini beranggapan bahwa variasi antar unit observasi tidak bersifat tetap, melainkan muncul secara acak dan dimasukkan ke dalam komponen error. Dengan demikian, perbedaan antar unit dianggap sebagai faktor acak yang turut memengaruhi hasil estimasi.

Dalam menentukan model data panel yang sesuai, perlu dilakukan pengujian yang dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut (Ghozali 2021).

1. Uji Chow: Pengujian ini digunakan untuk melihat perbandingan antara model *Common Effect* dan *Fixed Effect* jika nilai pprobabilitas melebihi 0,05 maka model yang sesuai adalah Common Effect, sedangkan jika nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka model yang dipilih adalah Fixed Effect.
2. Uji Hausman: Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah model yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Jika nilai probabilitas melebihi 0,05 maka model Random Effect yang dipakai, sedangkan bila nilai probabilitas di bawah 0,05 maka Fixed Effect menjadi pilihan yang sesuai.
3. Uji Lagrange Multiplier: Pengujian ini menentukan apakah CEM atau REM lebih sesuai dalam situasi tertentu. REM akan dipilih jika nilai probabilitas lebih rendah dari 0,05, namun jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka CEM akan dipilih.

3.5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Perlu diketahui bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas dengan analisis uji statistik yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0: Residual berdistribusi normal.

H_a: Residual tidak berdistribusi normal.

Adapun kriteria pengujian signifikansi Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H_0 diterima, sehingga residual dinyatakan berdistribusi normal.
2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H_0 ditolak, sehingga residual dinyatakan tidak berdistribusi normal.

2. Uji multikolinearitas

Bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan yang terlalu kuat. Model regresi dianggap bebas dari multikolinearitas apabila nilai korelasi lebih kecil 0,85, jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terdapat indikasi bahwa model mengalami masalah multikolinearitas.

3. Uji heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menilai apakah varians residual pada model regresi memiliki nilai yang sama antar pengamatan atau justru mengalami perbedaan, untuk melihatnya dilakukan pengujian dimana, Jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka model dianggap tidak heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan suatu keadaan ketika terjadi korelasi antara residual pada periode tertentu dengan tingkat kesalahan pada periode sebelumnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, maka kondisi tersebut disebut sebagai masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 2021).

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM) atau Breusch-Godfrey (BG). Dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai Probability Chi-Square < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat masalah autokorelasi.
2) Jika nilai Probability Chi-Square > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat masalah

3.6 Uji Statistik

1. Uji parsial (Uji t)

Digunakan untuk menilai sejauh mana masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian dilakukan berdasarkan nilai probabilitas (p-value) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai probabilitas lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak sehingga variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar 0,05, maka H0 gagal ditolak sehingga variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. (Ghozali 2021).

2. Uji simultan (Uji F)

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian dilakukan berdasarkan nilai probabilitas (p-value) dengan tingkat signifikansi

sebesar 0,05. Apabila nilai probabilitas lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak sehingga variabel independen secara simultan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar 0,05, maka H0 gagal ditolak sehingga variabel independen secara simultan dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji koefisien determinan (Adjusted R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Nilai adjusted R^2 berada antara 0 sampai 1, dimana nilai yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa model semakin baik.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

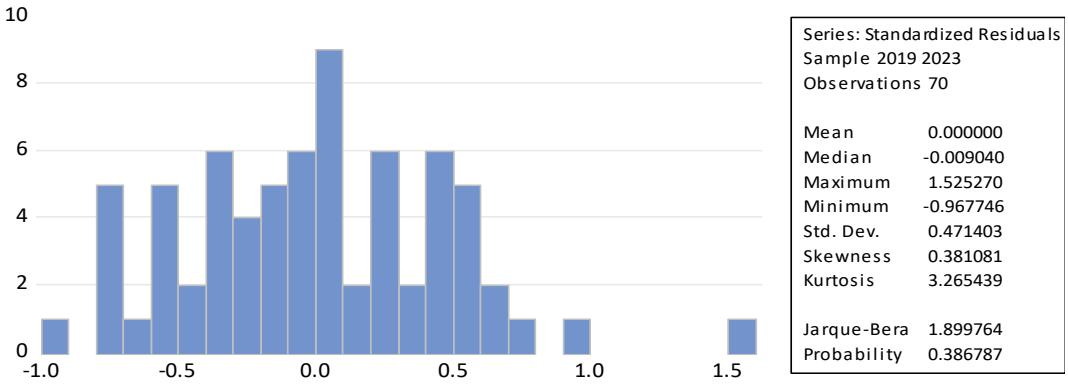
Berdasarkan Tabel 1 hasil Uji Chow diperoleh nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) lebih baik dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Selanjutnya, hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0003 yang juga lebih kecil dari 0,05, sehingga *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Random Effect Model* (REM). Dengan demikian, model yang paling sesuai untuk mengestimasi data dalam penelitian ini *adalah Fixed Effect Mode*l (FEM).

Table 1. Hasil Uji Pemilihan Model

Uji	Prob.	Hasil
Uji Chow	0,0000	FEM
Uji Hausman	0,0003	FEM

Sumber: Diolah menggunakan Eviews 14, 2026

Gambar 5 . Hasil Uji Normalitas



Sumber: Diolah menggunakan Eviews 14,2026

Pada Gambar 5 hasil menunjukkan bahwa nilai nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 1.899 764 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan jika data yang dianalisis dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Table 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	GINI	INFL	UNEMP
GINI	1.000000	-0.002057	0.067470
INFL	-0.002057	1.000000	-0.205296
UNEMP	0.067470	-0.205296	1.000000

Sumber: Diolah menggunakan Eviews 14, 2026

Hasil pengujian multikolineritas menunjukkan bahwa nilai korelasi antarvariabel independen tersebut berada di bawah batas kritis 0,85. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model penelitian. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Table 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Prob.	Signifikansi
C	0.757741	0.2500	0.05
GINI	-0.035776	0.9849	0.05
INFL	-0.006419	0.8306	0.05
UNEMP	-0.072702	0.0752	0.05

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 14

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.3 menunjukkan nilai probabilitas variabel GINI sebesar 0.9849, INFL sebesar 0.8306, dan UNEMP sebesar 0.0752. Seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model penelitian telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Table 4. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	1.749916

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 14

Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai Durbin-Watson Statistic sebesar 1.749916. Dengan jumlah observasi (n) sebanyak 70, jumlah variabel independen (k) sebanyak 3, dan tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai dL sebesar 1,52 dan dU sebesar 1,70. Dengan demikian, nilai $4 - dU = 2{,}30$ dan $4 - dL = 2{,}48$. Karena nilai Durbin-Watson memenuhi kriteria $dU < DW < 4 - dU$, yaitu $1{,}70 < 1.749916 < 2{,}30$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi, baik autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif, pada model regresi yang digunakan. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi klasik autokorelasi sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Table 5. Hasil Estimasi Model Data Panel

Variabel	Coefficient	Probabilitas	Kesimpulan	Arah Hubungan
C	2.164808	0.0988	Tidak signifikan	Positif
GINI	8.762898	0.0220	Signifikan	Positif
INFL	-0.019238	0.7458	Tidak Signifikan	Negatif
UNEMP	-0.172039	0.0343	Signifikan	Negatif
R-Squared	0.807620			
Adjusted R squared	0.749543			
F-statistic	13.90603			
Prob (F-statistic)	0.000000			

Sumber: Diolah menggunakan Eviews 14

Dari hasil estimasi di atas, maka dapat dibuat model regresi data panel sebagai berikut

$$\mathbf{LOG(CRIME)_{it} = 2.164808 + 8.762898GINI_{it} - 0.019238INFL_{it} - 0.172039UNEMP_{it}}$$

Variabel ketimpangan pendapatan dan pengangguran terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas pencurian, sedangkan variabel inflasi tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas pencurian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas (*p-value*) masing-masing variabel. Variabel ketimpangan pendapatan sebesar 0,0220 dan pengangguran sebesar 0,0343, yang lebih kecil dari 5%, sedangkan variabel inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7458, yang lebih besar dari 5%.

Dilihat dari koefisien regresi, variabel ketimpangan pendapatan memiliki koefisien sebesar 8,763. Hal ini berarti setiap kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 1 poin akan meningkatkan tingkat kriminalitas pencurian sebesar 8,763%. Variabel inflasi memiliki koefisien sebesar -0,019, yang berarti setiap kenaikan inflasi sebesar 1% akan menurunkan tingkat kriminalitas pencurian sebesar 0,019%, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Namun, pengaruh inflasi tersebut tidak signifikan secara statistik. Variabel pengangguran memiliki koefisien sebesar -0,172, yang berarti setiap kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1% akan menurunkan tingkat kriminalitas pencurian sebesar 0,172%, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Nilai F statistik sebesar 13.90603 dengan prob (F-statistik) 0,0000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan (Gini), Inflasi (Infl), dan Pengangguran (Unemp) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kriminalitas.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.749543 kemampuan variasi variabel independen yang terdiri dari ketimpangan pendapatan (Gini), inflasi (Infl), dan pengganguran (Unemp) dalam menjelaskan variasi variabel kriminalitas pencurian (Crime) di kab/kota di provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 74,95%, Sedangkan sisanya 25,05%, yaitu dijelaskan oleh variabel lain atau faktor yang berada diluar model dalam penelitian.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh ketimpangan Pendapatan Terhadap kriminalitas Pencurian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas pencurian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Temuan ini sejalan dengan penelitianZahra & Usman (2023) serta Salimah & Wahyudi (2025) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Layliya & Restikasari (2024) yang menemukan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas pencurian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan tingkat kriminalitas pencurian di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil penelitian ini mendukung Strain Theory yang dikemukakan oleh Robert K. Merton (1938). Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan tekanan (*strain*) akibat adanya kesenjangan antara tujuan ekonomi yang ingin dicapai dengan kesempatan yang dimiliki individu untuk mencapainya melalui cara yang sah. Ketika sebagian masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendapatan, maupun kesempatan ekonomi, sementara di sisi lain terdapat kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi. Tekanan tersebut pada akhirnya dapat mendorong sebagian individu untuk memilih tindakan kriminal sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Ardefa dkk, 2025).

Pada periode 2019–2023, ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat masih menunjukkan adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh kesempatan ekonomi yang memadai.

Dengan demikian, ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya mengurangi kriminalitas pencurian di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Pemerataan pendapatan dan perluasan kesempatan ekonomi dapat membantu mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarmasyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi menjadi penting dalam upaya menekan tingkat kriminalitas pencurian.

4.2.2 Pengaruh Inflasi Terhadap kriminalitas Pencurian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap kriminalitas pencurian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sihaloho dkk. (2024) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Berdasarkan hasil estimasi, nilai probabilitas variabel inflasi sebesar 0,7458, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, inflasi belum dapat dinyatakan sebagai faktor yang memengaruhi perubahan

tingkat kriminalitas pencurian di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat selama periode penelitian.

Kondisi tersebut diduga terjadi karena tingkat inflasi selama periode penelitian masih berada pada kondisi yang relatif terkendali. Selain itu, pemerintah secara aktif menerapkan berbagai kebijakan pengendalian inflasi, seperti stabilisasi harga kebutuhan pokok, operasi pasar, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Berbagai kebijakan tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat ketika terjadi kenaikan harga. Dengan demikian, perubahan harga tidak secara langsung meningkatkan tekanan ekonomi yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminalitas pencurian.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat kriminalitas pencurian di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat dijelaskan secara langsung oleh perubahan tingkat inflasi. Terdapat faktor-faktor lain yang kemungkinan memiliki pengaruh lebih besar terhadap kriminalitas pencurian. Faktor tersebut dapat berupa kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesempatan kerja, tingkat penegakan hukum, maupun karakteristik ekonomi pada masing-masing daerah. Oleh karena itu, inflasi bukan merupakan faktor yang secara statistik berpengaruh terhadap kriminalitas pencurian dalam penelitian ini.

Dengan demikian, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas pencurian di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat selama periode penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat inflasi belum cukup kuat untuk menjelaskan perubahan kriminalitas pencurian. Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengaruh inflasi terhadap kriminalitas tidak signifikan. Oleh karena itu, faktor lain di luar inflasi perlu diperhatikan dalam menjelaskan perubahan tingkat kriminalitas pencurian.

4.2.3 Pengaruh Pengangguran Terhadap kriminalitas Pencurian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas pencurian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian penelitiaan Rahmalia dkk (2019) dan Ardefa dkk (2025) yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap kriminalitas, namun bertolak belakang dengan penelitiaan Lestari (2024) yang menemukan bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap kriminalitas. Berdasarkan hasil estimasi, nilai probabilitas variabel pengangguran sebesar 0,0343, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga pengangguran terbukti berpengaruh secara statistik terhadap kriminalitas pencurian.

Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan karakteristik pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat yang sebagian terdiri dari pengangguran terdidik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pengangguran berasal dari berbagai tingkat pendidikan, termasuk lulusan SMA, diploma, dan perguruan tinggi. Kelompok tersebut memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang dapat menjadi modal untuk mencari pekerjaan atau mengembangkan usaha sendiri. Kondisi tersebut memungkinkan individu yang menganggur untuk mencari alternatif kegiatan ekonomi tanpa harus melakukan tindakan yang melanggar hukum (Rahmalia dkk., 2019).

Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan berbagai program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja bagi masyarakat. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memasuki pasar kerja maupun menciptakan peluang usaha secara mandiri (Nuraeni, 2020). Adanya pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, dan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi. Dengan adanya dukungan tersebut, individu yang menganggur tidak serta-merta menjadikan tindakan kriminalitas pencurian sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Dengan demikian, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas pencurian di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat selama periode penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya mengurangi kriminalitas pencurian. Pemerintah perlu meningkatkan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan dan mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan pengangguran.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan, inflasi, dan pengangguran terhadap kriminalitas pencurian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan tingkat kriminalitas pencurian di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas pencurian, yang menunjukkan bahwa perubahan tingkat inflasi belum cukup kuat untuk memengaruhi perubahan kriminalitas pencurian selama periode penelitian. Selanjutnya, pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas pencurian, sehingga kondisi ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya mengurangi kriminalitas pencurian di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat guna mengurangi pengangguran dan kriminalitas pencurian. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan memperluas periode pengamatan maupun menambahkan variabel lain yang relevan.

RUJUKAN PUSTAKA

Agustian, L. N., & Wiyono, V. H. (2021). The Role Of Economics In Explaining Theft Behavior: A Literature Review. *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, *6*(2), 74–91. https://jurnal.uns.ac.id/jaedc/article/view/79419

Amilia, D., & Ridwan, P. (2024). Analisis Tingkat Pendidikan , Pengangguran ,

Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Provinsi Bengkulu. *Pendidikan*, *5*(12), 1594–1607.

Andressony, D. (2024). Analisis Tingkat Pendidikan, pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas di Provinsi Kalimantan Tengah. *Bourjuis: Journal Of Economy*, *1*(3), 101–115.

Antara News. (2025). *Kasus pencurian mendominasi laporan di Polda Kalbar sepanjang 2025*. Antara News Kalimantan Barat. https://kalbar.antaranews.com/berita/681004/kasus-pencurian-mendominasi-laporan-di-polda-kalbar-sepanjang-2025

Ardefa, S. P., Naeruz, M., & Apriandi, A. (2025). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 4173–4177. https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1014

Audey, R. P., & Ariusn. (2019). Pegaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *1*(2), 653–666.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi kalimantan Barat 2019-2023.* Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Inflasi dan andil Komoditas Bahan Pokok Provinsi kalimantan Barat*. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Pengertian Inflasi.* Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Pengertian Ketimpangan Pendapatan.* Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Pengertian Pengangguran.* Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2019-2023*. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2025).*Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota diProvinsi Kalimantan Barat 2019-2023*. Badan Pusat Statistik.

Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Economic Analysis of the Law: Selected Readings*, *76*(2), 255–265. https://doi.org/10.1002/9780470752135.ch25

Dharmawan, A. S., Istiqomah, N., Nurmawati, P., & Rohmi, M. L. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Tindak Kriminalitas di Indonesia Tahun 2021-2023. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *3*(4), 27–41. https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1739

Febbyanto, D. R., Komariyah, S., & Adenan, M. (2026). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Independent Economics Journal*, *1*(2).

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kusumawati, K. N. N., & Aisyah, S. (2024). The Effect Of Socio-Economic Conditions On The Crime Rate In South Sulawesi Province. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *5*(2), 8493–8502. http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

Lestari, R. O. (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam …. *Jurnal Muamalat Indonesia*, *4*(2), 640–653. http://repository.radenintan.ac.id/32222/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/32222/1/PERPUS PUSAT BAB I DAN V.pdf

Merton, R. K. (2017). Social structure and anomie. *Gangs*, *3*(5), 3–13. https://doi.org/10.4324/9781351157803-1

Nuraeni, Y. (2020). Dampak Sosial Dan Ekonomi Pelatihan Kecakapan Hidup Dalam Rangka Penciptaan Dan Penumbuhan Wirausaha Baru (Studi Kasus Bantuan Program Pelatihan Kerja Dari Kementerian Ketenagakerjaan Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta). *Jurnal Ketenagakerjaan*, *15*(2), 88–105. https://doi.org/10.47198/naker.v15i2.76

Palokoto, T., Purwanti, E. Y., & Mudakir, Y. B. (2020). Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Analisis Konsekuensi Ekonomi Akibat Kejahatan di Indonesia Analisis Konsekuensi Ekonomi Akibat Kejahatan di Indonesia Analysis of the Economic Consequences of Crime in Indonesia Pendahuluan. *Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *20*(2), 146–159. https://doi.org/10.21002/jepi.2020.09

Rahmalia, S., Ariusni, & Triani, M. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, pengangguran, dan Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *1*(3), 21–36.

Salimah, N., & Wahyudi, H. (2025). *Pengaruh Ketimpangan Pendapatan , Pengangguran , Dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Tingkat Kejahatan Pencurian Di Pulau Sumatera Periode 2012-2021*. *02*(03), 1932–1943.

Septaria, R., & Zulfaridatulyaqin, S. M. (2021). Tingkat Kriminalitas di Kota Banjarmasin dengan Pendekatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *4*(1), 50–64.

Sihaloho, R. P., Simarmata, R. C., Sikumbang, R. Z., Manurung, I. S., Syaputra, M. I., & Satria, M. R. (2024). Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kriminalitas di Sumatera Utara. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(2), 262–268. https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.596

Soraya, N., Nurfikri, M. A., Rafi, A., Kurniawan, M., & Syariah, P. E. (2024). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi , Tingkat Kemiskinan , Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas di Indonesia Tahun 2013-2023 Data Registrasi Polri Kejadian Kejahatan Di Indonesia Periode 2012-2023 1 pendapatan , kemiskinan ,. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan (JEAP)*, *1*(3), 43–58.

Stiawan, B., & Yusuf, H. (2025). Dampak Kriminalitas Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Urban. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(6), 308–312.

https://doi.org/10.5281/zenodo.15516028

Susanti, S. T., Ananta, P., Suparta, I. W., & Murwiati, A. (2025). Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, *2*(6), 1794–1801.

Uduo, T. A. (2024). Assessing the Impact of Sentencing Practices on Drug Trafficking Deterrence in Nigeria : A Critical Evaluation of the Effectiveness of Leniency in Mitigating Drug Offenses. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, *11*(2), 192–208.

Winda, N., & Sentosa, S. U. (2022). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tindakan Kriminalitas Di Provinsi-Provinsi Di Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *3*, 65–72.

Yusuf, H., & Zanudin, S. (2025). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kota Metropolitan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, *2*(2 Mei), 2505–2516. https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/331

Zahra, I., & Usman, U. (2023). Pengaruh Variabel Ekonomi Terhadap Kriminalitas di Indonesia. *Ekonomika Indonesia*, *12*(2), 17–25.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data panel Ketimpangan Pendapatan (X1), Inflasi (X2), Pengangguran (X3), dan Tingkat Kriminalitas (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Crime (Y)	Gini (X1)	Infl (X2)	Unemp (X3)
1	Kab Sambas	2019	104	0,303	3,24	3,48
2	Kab Sambas	2020	49	0,275	2,78	3,71
3	Kab Sambas	2021	50	0,266	3,30	3,97
4	Kab Sambas	2022	32	0,256	4,68	5,08
5	Kab Sambas	2023	41	0,27	2,52	5,04
6	Kab Bengkayang	2019	170	0,309	4,09	2,66
7	Kab Bengkayang	2020	15	0,274	2,36	3,91
8	Kab Bengkayang	2021	11	0,263	2,98	4,42
9	Kab Bengkayang	2022	26	0,303	5,07	2,84
10	Kab Bengkayang	2023	33	0,337	3,13	2,92
11	Kab Landak	2019	91	0,271	3,08	2,69
12	Kab Landak	2020	39	0,293	2,55	3,38
13	Kab Landak	2021	55	0,31	3,11	3,22
14	Kab Landak	2022	58	0,288	5,12	1,78
15	Kab Landak	2023	53	0,265	2,60	2,24
16	Kab Mempawah	2019	31	0,292	3,17	5,11
17	Kab Mempawah	2020	56	0,273	2,80	7,55
18	Kab Mempawah	2021	51	0,283	2,12	7,71
19	Kab Mempawah	2022	47	0,302	4,67	7,48
20	Kab Mempawah	2023	43	0,291	2,40	7,33
21	Kab Sanggau	2019	164	0,304	1,94	3,00
22	Kab Sanggau	2020	67	0,279	3,25	3,52
23	Kab Sanggau	2021	61	0,330	4,44	3,45
24	Kab Sanggau	2022	75	0,285	5,16	3,76
25	Kab Sanggau	2023	130	0,321	0,80	3,86
26	Kab Ketapang	2019	269	0,290	3,06	3,17
27	Kab Ketapang	2020	133	0,290	2,75	7,30
28	Kab Ketapang	2021	164	0,261	4,52	6,94
29	Kab Ketapang	2022	220	0,266	5,31	6,71
30	Kab Ketapang	2023	327	0,279	1,60	6,57
31	Kab Sintang	2019	77	0,271	4,43	3,10
32	Kab Sintang	2020	30	0,294	2,45	4,50
33	Kab Sintang	2021	18	0,248	3,14	3,95
34	Kab Sintang	2022	37	0,277	4,83	2,97
35	Kab Sintang	2023	50	0,310	2,46	2,92
36	Kab Kapuas Hulu	2019	54	0,328	4,29	2,43
37	Kab Kapuas Hulu	2020	16	0,325	3,18	4,02

38	Kab Kapuas Hulu	2021	6	0,278	3,19	4,18
39	Kab Kapuas Hulu	2022	9	0,318	5,31	2,21
40	Kab Kapuas Hulu	2023	22	0,299	3,07	2,19
41	Kab Sekadau	2019	16	0,313	4,15	3,04
42	Kab Sekadau	2020	14	0,287	3,13	3,39
43	Kab Sekadau	2021	25	0,280	4,10	2,92
44	Kab Sekadau	2022	23	0,283	5,17	1,33
45	Kab Sekadau	2023	37	0,288	3,05	2,29
46	Kab Melawi	2019	27	0,323	3,92	2,39
47	Kab Melawi	2020	9	0,348	2,87	2,70
48	Kab Melawi	2021	5	0,300	2,87	2,66
49	Kab Melawi	2022	21	0,357	4,65	1,95
50	Kab Melawi	2023	44	0,392	2,89	2,46
51	Kab Kayong Utara	2019	27	0,321	3,71	3,89
52	Kab Kayong Utara	2020	10	0,322	2,56	3,71
53	Kab Kayong Utara	2021	5	0,294	2,84	3,78
54	Kab Kayong Utara	2022	19	0,280	4,60	3,1
55	Kab Kayong Utara	2023	31	0,312	3,30	3,04
56	Kab kubu Raya	2019	42	0,295	4,55	5,5
57	Kab kubu Raya	2020	79	0,29	1,84	7,14
58	Kab kubu Raya	2021	74	0,297	2,64	7,02
59	Kab kubu Raya	2022	72	0,294	7,14	6,87
60	Kab kubu Raya	2023	101	0,289	3,48	6,76
61	Kota Pontianak	2019	950	0,335	4,77	9,06
62	Kota Pontianak	2020	359	0,327	1,27	12,36
63	Kota Pontianak	2021	321	0,337	2,07	12,38
64	Kota Pontianak	2022	262	0,363	5,03	9,92
65	Kota Pontianak	2023	407	0,347	3,13	8,92
66	Kota Singkawang	2019	69	0,292	1,09	6,31
67	Kota Singkawang	2020	90	0,286	1,55	8,78
68	Kota Singkawang	2021	41	0,319	2,49	9,16
69	Kota Singkawang	2022	46	0,291	4,49	8,63
70	Kota Singkawang	2023	85	0,274	2,91	8,51
71	Kalbar	2019	1269	0,327	2,63	4,35
72	Kalbar	2020	982	0,317	1,46	5,81
73	Kalbar	2021	905	0,313	1,45	5,82
74	Kalbar	2022	974	0,314	6,30	5,11
75	Kalbar	2023	838	0,321	2,02	5,05